

## Implementasi Peraturan Bupati Mojokerto No. 66 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegritas Di Kecamatan Gondang

Cici Ariyanti

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dida Rahmadanik

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

M. Kendry Widlyanto

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Address: Jalan Semolowaru No. 45, Menur Pumpungan, Sukolilo,  
Menur Pumpungan, Sukolilo, Kota SBY, Jawa Timur 60118  
Corresponding author: [ariyantc899@gmail.com](mailto:ariyantc899@gmail.com)

**Abstract:** *Stunting is a condition where toddlers fail to grow and develop due to malnutrition when they are in the womb until they are born into the world, but the condition of stunting is visible after the baby is 2 years old. Nutritional problems in toddlers, especially stunting experienced by toddlers, have the risk of hampering the growth and development of toddlers, especially if the stunting condition turns into stunting. The aim of this research is to determine and analyze the implementation of regulations to accelerate integrated stunting reduction as an effort to reduce stunting rates in Gondang sub-district. This type of research is qualitative research with descriptive methods. The research findings show that in implementing the Mojokerto Regent's regulatory policy No. 66 of 2021 concerning the acceleration of integrated stunting reduction, the district government has collaborated with the sub-district government, village government and the community effectively.*

**Keywords:** *Implementation, Public Policy, Stunting*

**Abstrak:** Stunting adalah kondisi gagal tumbuh kembang anak balita akibat dari kekurangan gizi saat mereka dalam kandungan hingga dilahirkan ke dunia, tetapi kondisi stunting terlihat setelah bayi berusia 2 Tahun. Permasalahan gizi pada balita terutama kejadian pendek (stunted) yang dialami oleh balita beresiko menghambat pertumbuhan dan perkembangan balita terutama jika kondisi pendek (stunted) berubah menjadi kejadian stunting. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis implementasi peraturan percepatan penurunan stunting terintegritas sebagai upaya mengurangi angka stunting di kecamatan Gondang. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melaksanakan kebijakan peraturan Bupati Mojokerto No. 66 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting terintegritas, pemerintah kabupaten telah melakukan kerja sama dengan pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan masyarakat secara efektif.

**Kata kunci:** Implementasi, Kebijakan Publik, Stunting

### LATAR BELAKANG

Stunting merupakan kondisi dimana anak tidak dapat tumbuh dan berkembang akibat kekurangan gizi sejak dalam kandungan hingga lahir, namun stunting terlihat jelas setelah usia 2 tahun. Permasalahan gizi pada balita, khususnya keterlambatan tumbuh kembang pada balita, berpotensi menghambat tumbuh kembang balita, apalagi jika terjadi stunting. Beberapa dampak yang mungkin dialami anak stunting dalam kehidupannya adalah berkurangnya kemampuan intelektual, rentan terhadap penyakit tidak menular, berkurangnya

produktivitas pada usia produktif yang berpotensi berujung pada kemiskinan dan lemahnya keluarga. pendapatan dan kemampuan melahirkan anak dengan kondisi serupa, bahkan keterlambatan perkembangan.

Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu daerah yang masih memiliki angka stunting yang cukup tinggi yaitu sebesar 27,4% pada tahun 2022 dan menargetkan penurunan angka stunting menjadi 23,95% pada tahun 2023. Stunting pada anak berdampak pada meningkatnya angka kesakitan dan kematian, kurang optimalnya perkembangan kognitif, motorik dan bahasa pada anak, serta meningkatnya biaya pengobatan. Gangguan – kelainan yang terjadi cenderung bersifat irreversible dan mempengaruhi perkembangan selanjutnya sehingga meningkatkan risiko terjadinya penyakit degeneratif di usia dewasa. Stunting juga dapat mempengaruhi kinerja pendidikan anak sehingga menyebabkan hasil belajar kurang optimal dan menurunnya produktivitas kerja akibat rendahnya kecerdasan anak. Penyebab stunting banyak faktor yang saling berinteraksi dan tiap daerah mempunyai penyebab yang berbeda-beda. Penyebab utama stunting adalah gizi buruk dan penyakit menular. Faktor-faktor seperti ketahanan pangan keluarga, kebiasaan orang tua, pelayanan kesehatan yang tidak memadai, dan kesehatan lingkungan juga menjadi penyebab tidak langsung terjadinya stunting.

Kecamatan Gondang memiliki 18 desa yaitu Ngembat, Jatidukuh, Kalikatur, Bakalan, Kemasantani, Padi, Centong, Gondang, Gumeng, Pugeran, Kebontunggul, Wonoploso, Pohjejer, Bening, Karangtuten, Tawar, Beganganlimo, Dilem. Diantara beberapa desa yang ada di kecamatan Gondang desa Padi dan desa Bening memiliki angka penurunan stunting yang cukup signifikan di setiap tahunnya. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto, dr Ulum Rokhmat Rokhmawan menjelaskan, angka stunting di wilayahnya mencapai 27,4% pada tahun 2021 berdasarkan Survei Status Stunting Indonesia (SSGI). Pada tahun 2022, angka stunting dan gizi buruk pada anak dibawah 5 tahun akan menurun menjadi 11,6%. Sedangkan berdasarkan data Registrasi dan Pelaporan Gizi Masyarakat Secara Elektronik (E-PPGBM) per Agustus 2022, jumlah balita stunting di Kabupaten Mojokerto sebanyak 2.132 anak atau setara dengan 4.000 anak terukur. Balita berjumlah 2.248 orang dan balita kurus sebanyak 2.137 orang. Jumlah anak yang diukur saat itu sebanyak 44.324 dari total sasaran 79.773 anak. Pada tahun 2023, persentase balita stunting di Kabupaten Mojokerto mengalami sedikit peningkatan menjadi 5,01% dari berat badan anak. Sebab, jumlah anak stunting saat ini sebanyak 2.219 orang. Sedangkan jumlah bayi yang ditimbang sebanyak 44.257 bayi atau mencapai 53,59% dari target berat badan sebanyak 82.591 bayi. Sebanyak 2.849 anak mengalami gizi buruk atau 6,44% dan 2.895 anak mengalami gizi buruk atau 6,54%. Ribuan

anak stunting tersebar di 18 kecamatan di Kabupaten Mojokerto antara lain Sooko 151, Trowulan 101, Puri 22, Bangsal 22, Mojoanyar 176, Gedeg 67, Kemlagi 249, Dawarblandong 21, Jetis 361, Mojosari 17, Pungging 272, Ngoro 153, Dlanggu 121, Kutorejo 44, Pacet 119, Trawas 232, Gondang 31 dan Jatirejo 62 anak.

Provinsi Jawa Timur adalah daerah salah satu dari 12 provinsi yang diprioritaskan untuk menurunkan angka stunting. Terlihat Provinsi Jawa Timur menduduki peringkat kedua dengan jumlah anak stunting terbanyak yaitu sebanyak 656.449 anak karena stunting merupakan permasalahan lintas sektoral sehingga diperlukan kerjasama dengan sejumlah instansi terkait. Oleh karena itu, perlu tercipta sinergi, kerjasama dan konvergensi dalam penanganan stunting di Jawa Timur. Strategi penurunan jumlah anak stunting di Jawa Timur tertuang dalam landasan hukum yaitu Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2021 tentang Percepatan Integrasi Penurunan Gizi Buruk dan Stunting Periode 2021-2024, dimana peraturan ini dikembangkan untuk menciptakan lingkungan yang sehat bagi anak. kondisi kehidupan, sumber daya manusia yang cerdas dan produktivitas untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, diperlukan percepatan penurunan stunting secara terpadu di Provinsi Jawa Timur dengan melibatkan peran serta instansi pemerintah dan pihak terkait (Peraturan Gubernur Jawa Timur, 2021). Untuk mempercepat penurunan stunting secara terpadu, pemerintah provinsi diarahkan untuk melaksanakan lima pilar strategi nasional percepatan penurunan stunting, antara lain penguatan komitmen dan visi kepemimpinan pemerintah provinsi, penguatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat, penguatan kapasitas. untuk menyatukan intervensi spesifik dan intervensi sensitif di pemerintah provinsi. , meningkatkan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat, sekaligus memperkuat dan mengembangkan sistem, data, informasi, penelitian dan inovasi.

Permasalahan yang berkaitan dengan stunting pada balita diantaranya adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh banyak faktor seperti kondisi sosial ekonomi, gizi ibu saat hamil, penyakit pada masa kanak-kanak, asupan gizi yang buruk dan asupan gizi yang tidak mencukupi pada bayi. Di masa depan, anak stunting akan kesulitan memaksimalkan perkembangan fisik dan kognitifnya (Kemenkes RI 2018). Kegagalan untuk menambah tinggi badan mungkin merupakan tanda dari berbagai kelainan patologis yang berhubungan dengan peningkatan morbiditas dan mortalitas, hilangnya pertumbuhan fisik, dan gangguan kesehatan neurologis dan mental serta peningkatan risiko penyakit kronis di masa dewasa. Gangguan kognitif dan fisik yang parah dapat menghambat perkembangan, sehingga menimbulkan ancaman bagi pembangunan manusia.

World Health Organization (WHO) memperkirakan jumlah balita stunting atau kerdil di seluruh dunia telah mencapai 22% atau 149,2 juta anak, dengan lebih dari separuh anak di bawah usia 5 tahun terkena stunting di Asia dengan angka 53% dan di Afrika dengan tingkat 41%. Pada tahun 2022, angka tersebut dapat meningkat secara signifikan seiring dengan terjadinya pandemi Covid-19 yang melanda dunia dalam dua tahun terakhir dan diperkirakan akan berdampak pada segala bentuk malnutrisi akibat menurunnya perekonomian rumah tangga, keterbatasan terkait ketersediaan dan keterjangkauan makanan bergizi, serta kendala yang timbul, ada layanan nutrisi penting, dan pembatasan aktivitas fisik. Strategi yang lebih spesifik diperlukan jika dunia ingin mencapai target global untuk mengurangi jumlah anak-anak yang mengalami stunting menjadi 104 juta pada tahun 2025 dan 87 juta pada tahun 2030. Untuk mencapai target stunting global, negara-negara harus berkontribusi dan menetapkan target pengurangan stunting di masing-masing negara, dengan target tersebut disesuaikan dengan karakteristik gizi, faktor risiko, tren kelemahan, perubahan demografi, pengalaman dalam mengembangkan dan menerapkan kebijakan gizi dan pengembangan sistem kesehatan. Menetapkan target nasional akan membantu mengembangkan kebijakan dan program nasional sedemikian rupa sehingga dapat memperkirakan tingkat sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakannya. Mengurangi stunting merupakan prioritas nasional di Indonesia. Pada tahun 2021, angka stunting di Indonesia mencapai 24,4% dengan jumlah anak di bawah 5 tahun mencapai 5,33 juta jiwa. Angka tersebut menunjukkan angka stunting di Indonesia sudah melampaui batas WHO sebesar 20%. (Bappeda, 2022) (Karida et al., 2023)

## **KAJIAN TEORITIS**

Implementasi adalah membangun hubungan yang memungkinkan terwujudnya tujuan kebijakan publik sebagai hasil kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, hal ini melibatkan penciptaan “sistem penyampaian kebijakan”, yang di dalamnya sarana-sarana khusus dirancang dan dilaksanakan dengan harapan dapat mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dengan demikian, kebijakan publik menyatakan secara luas mengenai tujuan, sasaran, dan sarana diterjemahkan ke dalam program tindakan yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang dinyatakan dalam kebijakan.

Teori implementasi kebijakan menurut Grindle, teori ini dikenal dengan “Implementation as Political and Administrative Process”. Keberhasilan dalam suatu program dapat dilihat dari suatu proses pencapaian hasil akhirnya (outcomes) yaitu berhasil atau tidaknya tujuan yang akan dicapai. Dalam keberhasilan suatu program dapat dilihat dengan

dua hal yaitu proses kebijakan, apakah dalam pelaksanaan kebijakan telah sesuai dengan yang ditentukan dengan mengarah pada pelaksanaan kebijakannya. Dalam mencapai tujuan yang akan dicapai harus memiliki impact atau efek dan perubahan baik secara individu maupun kolektif dalam masyarakat. Kedua, sejauh mana kebijakan di implementasikan, termasuk isi (content of policy) dan konteks pelaksanaannya (context of implementation), juga mempengaruhi seberapa besar keberhasilan kebijakan publik. Implementasi di pengaruhi:

- 1) Isi Kebijakan
- 2) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan
- 3) Jenis manfaat yang dihasilkan
- 4) Derajat perubahan yang diinginkan
- 5) Kedudukan pembuat kebijakan
- 6) Pelaksanaan program
- 7) Sumber daya yang dihasilkan
- 8) Lingkungan Implementasi
- 9) Kekuasaan kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat
- 10) Karakteristik lembaga dan penguasa
- 11) Kepatuhan dan daya tanggap

Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan. Pada penelitian ini menggunakan teori dari Merilee S. Grindle yang menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel besar yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Penggunaan teori tersebut dapat membantu peneliti untuk menganalisis implementasi kebijakan penyelenggaraan angkutan orang di jalan dan kendaraan umum secara lebih mendalam.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Alasan memilih penelitian kualitatif yaitu untuk menganalisis dan menggambarkan fenomena tentang implementasi percepatan penurunan stunting. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto. Fokus penelitian dalam penelitian ini berfokus pada “implementasi peraturan bupati Mojokerto No. 66 tahun 2021 tentang

percepatan penurunan stunting terintegritas di Kecamatan Gondang” Fokus penelitian ini berdasarkan teori dari Merilee S. Grindle. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk data yang digunakan dalam mengumpulkan informasi terkait dengan percepatan penurunan stunting di kecamatan Gondang dalam upaya mengurangi angka stunting yaitu data primer dengan melakukan wawancara dengan informan. Metode analisis yang digunakan peneliti adalah teknik analisis data yang dikembangkan Miles & Huberman, yang menggunakan empat komponen analisis yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Isi Kebijakan. Terdapat 6 indikator dalam dimensi ini yaitu:

### **1. Kepentingan yang mempengaruhi kebijakan**

Kepentingan yang terpengaruhi menurut Merilee S. Grindle menjelaskan bahwa implementasi kebijakan harus mengacu pada kepentingan yang dapat mempengaruhi sejauh mana kepentingan tersebut mempengaruhi implementasinya. Kepentingan terkait kebijakan mempengaruhi seberapa besar kepentingan kelompok sasaran diintegrasikan ke dalam isi kebijakan. Kepentingan-kepentingan tersebut terkait dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Alasan indikator ini adalah karena terdapat banyak kepentingan yang perlu dipertimbangkan ketika menerapkan suatu kebijakan dan seberapa besar pengaruh kepentingan tersebut terhadap implementasinya. Hal ini mempengaruhi kelompok sasaran seperti catin, ibu hamil, dan ibu balita dalam percepatan penurunan stunting terintegritas yang dapat berkontribusi dalam mewujudkan program pemerintah tersebut dalam mengurangi angka stunting.

### **2. Jenis manfaat yang dihasilkan**

Menurut Merilee S. Grindle indikator jenis manfaat yang dihasilkan ini menjelaskan bahwa suatu kebijakan harus menunjukkan atau menjelaskan mengenai manfaat atau dampak apa yang ingin dihasilkan dari kebijakan yang telah diimplementasikan. Kebijakan yang dilaksanakan ini akan memberikan manfaat bagi kelompok sasaran seperti catin, ibu hamil dan Ibu yang memiliki balita stunting. Dengan adanya kebijakan percepatan penurunan stunting terintegritas ini memberikan dampak bagi masyarakat sehingga penurunan stunting sangat diperhatikan, selain itu penanganan percepatan penurunan stunting terintegritas ini tidak mengalami peningkatan. Pada poin ini, di dalam suatu kebijakan terkait tipe manfaat kebijakan merupakan suatu kebijakan

yang harus dapat memiliki manfaat dan keberhasilan yang memberikan dampak positif dalam pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan. Manfaat dari Peraturan Bupati Mojokerto No. 66 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegritas yakni Peraturan ini menjadi dasar dalam upaya untuk penanganan percepatan penurunan stunting terintegritas khususnya di kecamatan Gondang dan masyarakat merasa adanya bentuk perhatian dari pemerintah terhadap proses penurunan stunting ini.

### **3. Derajat perubahan yang diinginkan**

Menurut Merilee S. Grindle indikator derajat perubahan yang diinginkan ini menjelaskan bahwa derajat perubahan yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan harus dimiliki skalanya jelas, dan harus dimasukkan dalam isi kebijakan. Jika suatu kebijakan tidak memiliki tujuan dengan skala yang jelas dan terukur, maka implementasinya akan lebih sulit, yang berarti bagaimana perubahan yang akan dicapai dengan adanya implementasi, sehingga memberikan berapa besar perubahan yang dihasilkan. Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan tentunya mempunyai dasar kebijakan yang berfokus dalam menginginkan adanya perubahan pada suatu bentuk maupun situasi. Jika suatu kebijakan tidak memiliki tujuan dengan skala yang jelas dan terukur, maka implementasinya akan lebih sulit, yang berarti bagaimana perubahan yang akan dicapai dengan adanya implementasi, sehingga memberikan berapa besar perubahan yang dihasilkan. Kebijakan percepatan penurunan stunting menginginkan terjadinya perubahan yaitu dapat mengurangi angka balita stunting di kecamatan Gondang.

### **4. Kedudukan Pembuat Kebijakan**

Menurut Merilee S. Grindle indikator kedudukan pembuat kebijakan ini menjelaskan bahwa pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memainkan peran penting dalam pelaksanaan kebijakan oleh karena itu, bagian ini harus menjelaskan dimana pengambilan keputusan mengenai kebijakan yang akan diterapkan. yang berarti letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan. Tentu dalam hal ini mengarah pada kepentingan dari institusi, pembuat kebijakan dan kelompok sasaran di dalam kebijakan tersebut. Dalam indikator ini letak kedudukan pembuat kebijakan percepatan penurunan stunting terintegritas menginginkan terjadinya perubahan yaitu mengurangi angka stunting yang dapat menentukan keberhasilan suatu kebijakan, ketika keputusan yang ditetapkan berjalan dengan baik maka tujuan kebijakan dapat tercapai dengan baik.

## **5. Pelaksanaan Program**

Menurut Merilee S. Grindle indikator pelaksana program ini menjelaskan bahwa suatu kebijakan harus menyebutkan pelaksanaannya secara rinci. Pelaksana program juga harus mempunyai kompetensi dan kapabilitas di bidangnya sehingga tujuan kebijakan dapat tercapai pelaksana program dalam menjalankan suatu kebijakan perlu didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang memiliki kompetensi dan kapabilitas dibidangnya demi keberhasilan suatu kebijakan. Dalam indikator ini, pelaksana program serta tim anggota yang berwenang dalam percepatan penurunan stunting terintegritas untuk mengurangi angka stunting di kecamatan Gondang. Pihak yang berpartisipasi dalam percepatan penurunan stunting terintegritas yaitu pemerintah kabupaten yang menjadi pembuat kebijakan dengan beberapa peran dari pemerintah desa yang melaksanakan kebijakan dengan benar sesuai dengan harapan para pengambil keputusan. Pemerintah desa yaitu membentuk TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting) di tingkat desa. Kebijakan memiliki pengaruh yang besar yang artinya sikap pelaksana dapat melaksanakan kebijakan dengan tepat sesuai dengan harapan pembuat kebijakan. Sebaliknya, jika sikap pelaksana tidak mendukung dalam implementasi kebijakan maka implementasi tidak dapat berjalan sesuai harapan.

## **6. Sumber daya yang dihasilkan**

Menurut Merilee S. Grindle pelaksanaan suatu kebijakan perlu didukung oleh sumber daya yang mendukung agar implementasi berjalan dengan baik. Dalam indikator ini mengenai angkutan orang di jalan dan kendaraan umum untuk mengurangi kemacetan akan berjalan baik jika Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki kemampuan dan dapat menjalankan Kebijakan percepatan penurunan stunting terintegritas untuk mengurangi angka stunting di kecamatan Gondang. Implementasi kebijakan tentu saja diperlukan sumber daya baik berupa sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya. Terkait kebijakan percepatan penurunan stunting terintegritas biaya fasilitas yang digunakan dalam angkutan ini berasal dari Sumber anggaran yang dipergunakan adalah dari APBDes khususnya dari Dana Desa. Dalam rangka mendekatkan pelayanan percepatan penurunan stunting kabupaten/kota kepada desa/kelurahan, dibentuk TPPS kecamatan yang dikoordinasikan oleh Camat. Secara lebih spesifik, TPPS Kecamatan bertugas memberikan pendampingan dan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa untuk percepatan penurunan stunting. Sementara, pada tingkat desa/kelurahan percepatan penurunan stunting menjadi tanggung jawab Kepala Desa/Lurah dengan pelaksanaan teknis dilakukan oleh TPPS desa/kelurahan yang

dikoordinasikan oleh ketua Tim Penggerak PKK. Penyelenggaraan TPPS desa/kelurahan difokuskan pada operasional data, penggerakan dan pendampingan keluarga. TPPS desa mengoordinasikan secara langsung pelayanan dan pendampingan kepada sasaran percepatan penurunan stunting yang dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga. Dengan dibentuknya TPPS di seluruh tingkatan administrasi pemerintahan dan dalam rangka pengendalian pelaksanaan percepatan penurunan stunting, maka perlu dilakukan standarisasi mekanisme dan tata kerja percepatan penurunan stunting.

Lingkungan Kebijakan. Ada 3 indikator dalam dimensi ini, yakni :

### **1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat**

Kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat menurut Grindle menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan kekuasaan, kepentingan-kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor untuk memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Pada indikator ini dalam menjalankan implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting terintegritas, pemerintah kabupaten yaitu Bupati Mojokerto memiliki peran penting dalam memberikan keputusan dalam mengimplementasikan kebijakan yang di bantu oleh pemerintah desa. Dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting di tingkat desa/kelurahan dibutuhkan tim pendamping keluarga yang akan melakukan pendampingan keluarga yang berisiko stunting. Tim Pendamping Keluarga yang selanjutnya disebut TPK adalah tim yang terdiri dari bidan/perawat/tenaga kesehatan lainnya, Kader TP PKK, dan kader KB/kader lainnya yang melaksanakan pendampingan kepada keluarga berisiko stunting. Tugas tim pendamping keluarga meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi penerimaan program bantuan sosial serta surveilans untuk mendeteksi dini faktor resiko stunting.

### **2. Karakteristik lembaga dan penguasa**

Menurut Merilee S. Grindle indikator karakteristik lembaga dan penguasa ini menjelaskan bahwa, lingkungan dimana kebijakan diimplementasikan juga mempengaruhi keberhasilan kebijakan tersebut. Tujuan bagian ini adalah untuk menjelaskan karakteristik insitusi yang mempengaruhi kebijakan. Mengenai karakteristik lembaga dan pemerintah yang memiliki wewenang sebagai wadah agar implementasi kebijakan yang dijalankan dapat terealisasikan. Kaitanya dengan indikator ini adalah peran lembaga yaitu pemerintah kabupaten dan pemerintah desa harus dapat memberikan pelayanan dan pendampingan tersebut agar masyarakat sadar akan pentingnya menjaga pola hidup sehat dan menjaga gizi yang masuk ketubuh mereka agar angka stunting di kecamatan Gondang menurun.

Keinginan perilaku dan karakteristik implementasi kebijakan memegang peranan penting dalam melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan atau spesifikasinya. Sifat-sifat penting yang harus menjamin bahwa penguasa selalu melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Dalam wawancara dengan pelaksana program penurunan stunting ini perlu mendapatkan dukungan bahwa program dalam percepatan penurunan stunting terintegritas sangat berguna untuk upaya mengurangi angka stunting.

### **3. Kepatuhan dan daya tanggap**

Kepatuhan dan daya tanggap menurut Merilee S. Grindle menjelaskan bahwa Ketaatan serta respon dalam menanggapi implementasi yang dilakukan oleh para pelaksana dan respon dari para pelaksana dalam menanggapi implementasi, yang dilakukan dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan kepatuhan dan daya tanggap dari para pelaksana yang diutamakan. Maka pada indikator ini melihat sejauhmana kepatuhan dan daya tanggap dari para pelaksana dalam menanggapi kebijakan dari percepatan penurunan stunting terintegritas. Kepatuhan dan daya tanggap dari pelaksana dalam menanggapi kebijakan tersebut merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari implementasi percepatan penurunan stunting terintegritas untuk mengurangi angka stunting. Perilaku sasaran juga mempengaruhi kinerja kebijakan. Dalam indikator ini peran masyarakat juga dibutuhkan untuk ikut andil dalam mensukseskan kebijakan tersebut dalam percepatan penurunan stunting terintegritas dikecamatan Gondang kabupaten Mojokerto. Pengimplementasian kebijakan peraturan Bupati No. 66 tahun 2021 tingkat kepatuhan dan daya tanggap dari pelaksana sudah sangat baik dalam pelaksanaan kebijakan tersebut akan tetapi target dan harapan masih belum sesuai dengan yang diharapkan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilaksanakan pada implementasi kebijakan Percepatan Penurunan Stunting Terintegritas di Kecamatan Gondang yang termuat pada Peraturan Bupati Mojokerto No. 66 tahun 2021 terkait pelaksanaannya sudah menjalankan tugasnya dapat disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting terintegritas telah menjadi permasalahan publik yang tentunya menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemerintah provinsi Jawa Timur perlu bekerja sama dengan berbagai elemen instansi baik dari kalangan pemerintah swasta, akademisi, media dan

masyarakat. Peran pelaksana program serta tim anggota yang berwenang dalam percepatan penurunan stunting terintegritas untuk mengurangi angka stunting di kecamatan Gondang sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan bidangnya dan pelaksanaan percepatan penurunan stunting di kecamatan gondang ini sudah berjalan dengan baik. Dengan ini implementasi peraturan percepatan stunting terintegritas di kecamatan gondang ini dapat memberikan pengaruh yang baik bagi masyarakat seperti ibu hamil yang sudah cukup memperhatikan dan memenuhi asupan gizi yang dibutuhkan, hal ini dilakukan untuk lebih menjamin keluarga berisiko stunting terfasilitasi dalam memperoleh informasi tentang stunting, memperoleh pelayanan kesehatan dan rujukan, memperoleh sanitasi dan air bersih serta menerima bantuan program sosial, pendampingan oleh tim pendamping keluarga.

### **Saran**

Dari kesimpulan di atas maka peneliti dapat memberikan saran terkait Implementasi Percepatan Penurunan Stunting Terintegritas sebagai upaya mengurangi angka stunting di Kecamatan Gondang yaitu pelaksana atau pemerintah desa dapat meningkatkan pelaksanaan kebijakan hal ini penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik dan berdampak positif bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga dapat meningkatkan sosialisasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut agar dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Dengan adanya kerja sama yang baik antara pemerintah dan berbagai pihak terkait, diharapkan implementasi kebijakan penyelenggaraan angkutan orang di jalan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh pemangku kepentingan serta masyarakat kecamatan gondang secara keseluruhan. Dengan peningkatan yang dilakukan oleh pemerintah desa, diharapkan dapat mengurangi angka stunting di kecamatan Gondang.

### **DAFTAR REFERENSI**

- Andriani, V., Fransiscus, D., & Sri, X. (2023). Konstruksi Masyarakat Kelurahan Blooto Pada Inovasi Program Penurunan Angka Stunting. 12(03), 131–140.
- Mudi, S. Di., Turtiantoro, & Erowati, D. (2018). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang Dalam Penurunan Dan Penanggulangan Stunting di Desa Longkey, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pematang Tahun 2021. *Jurnal Skripsi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UNDIP*, 1(1), 1–13.
- Rahmadhita, K. (2020). Permasalahan Stunting dan Pencegahannya. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 11(1), 225–229. <https://doi.org/10.35816/jiskh.v11i1.253>

- Wardita, Y., Suprayitno, E., & Kurniyati, E. M. (2021). Determinan Kejadian Stunting pada Balita. *Journal Of Health Science (Jurnal Ilmu Kesehatan)*, 6(1), 7–12. <https://doi.org/10.24929/jik.v6i1.1347>
- Norsanti, N. (2021). EFEKTIVITAS PROGRAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KECAMATAN BATUMANDI KABUPATEN BALANGAN (Studi Kasus Pada Desa Mampari dan Desa Banua Hanyar). *Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 3(1), 10. <https://doi.org/10.20527/jpp.v3i1.3825>
- Purba, S. H. (2019). Analisis Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting Di Desa Secanggang Kabupaten Langkat. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Rahmadhita, K. (2020). Permasalahan Stunting dan Pencegahannya. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 11(1), 225–229. <https://doi.org/10.35816/jiskh.v11i1.253>